

**PENGARUH PERENCANAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN TERHADAP
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Jenilia Nur Aina
Futum Hubaib¹ dan Salasiah²**

¹Program Studi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

²Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.

E-Mail: jenilia_nuraina@yahoo.co.id

ABSTRACT

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

UU memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari *command and control* menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan dan pengawasan anggaran terhadap efektifitas keuangan, serta mengetahui kendala yang dihadapi sehingga efektifitas anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian terhadap pengaruh perencanaan dan pengawasan anggaran terhadap efektifitas pengelolaan keuangan pada dinas pekerjaan umum provinsi Kalimantan timur diukur dengan menggunakan tiga variabel yaitu perencanaan, pengawasan dan efektivitas, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa efektifitas pengelolaan keuangan sudah sangat baik, ini terbukti dari hasil rekapitulasi mendapatkan hasil lebih dari 60%. Yang artinya bahwa perencanaan dan pengawasan yang dilakukan menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang baik.

Kata kunci : Perencanaan, Pengawasan Anggaran

I. PENDAHULUAN

Dengan diterapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (telah diperbaharui dengan UU no. 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 (telah diperbaharui dengan UU No. 33 tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak tahun 2000, telah memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.

Selanjutnya melalui kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah juga merupakan peluang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada

pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). UU ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari *command and control* menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik.

Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan *entrepreneur* (wirausaha) dalam proses pembangunan. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi penganggaran.

Reformasi tersebut meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (dalam pembahasan selanjutnya yang dimaksud dengan anggaran dalam penelitian ini adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat dengan APBD).

Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama dalam penganggaran yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan *New Public Management*. Model *New Public Management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender (Mardiasmo, 2002).

Perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget* (anggaran kinerja), merupakan usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

1. Komprehensif dan komparatif
2. Terintegrasi dan lintas departemen
3. Proses pengambilan keputusan yang rasional
4. Berjangka panjang
5. Spesifikasi tujuan dan perangkian prioritas
6. Analisis total *cost* dan *benefit*
7. Berorientasi *input*, *output*, dan *outcome*

8. Adanya pengawasan kinerja

Dengan demikian, pendekatan kinerja pada dasarnya disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran perencanaan dan pengawasan anggaran terhadap efektifitas keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi sehingga efektifitas keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur belum sesuai dengan yang diharapkan?

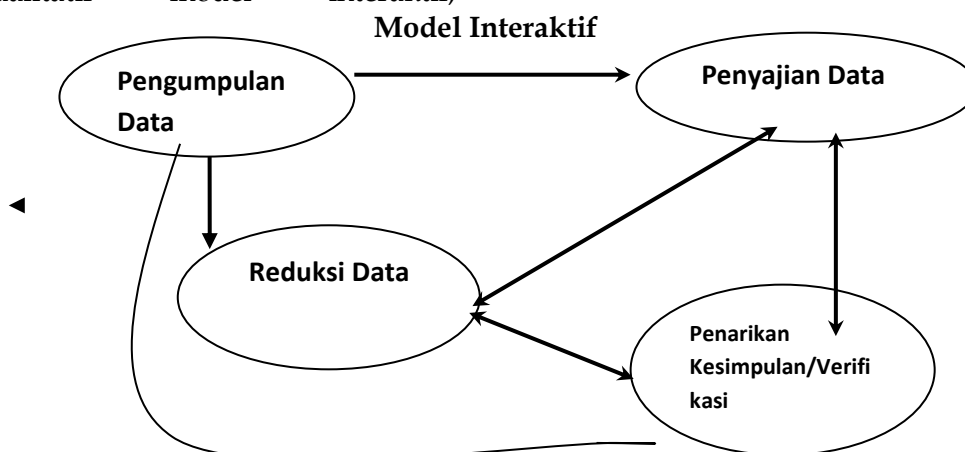
III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Nazir (2003:78) "penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis

data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif,

berdasarkan pendapat Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (dalam Soegiyono, 2006 : 247) yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1. Analisis Data Kualitatif Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, 1992:20).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan - keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

Perencanaan dilakukan guna menentukan pos-pos mana yang akan dibiayai dan agar tepat guna. Perencanaan anggaran dalam upaya untuk mengetahui kualitas anggaran yang akan di susun, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1. Tanggapan responden mengenai Dalam APBD telah disebutkan dengan jelas masing-masing *input*, *output* dan *outcome* untuk setiap kegiatan/program

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat setuju	5	13	65	33.33
2	Setuju	4	26	104	66.67
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak setuju	1	0	0	0
Total			39	169	100
Rata-rata Skor = $\frac{169}{39} = 4.33$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Dalam APBD telah disebutkan dengan jelas masing-masing *input*, *output* dan *outcome*

untuk setiap kegiatan/program, sebagian responden memberikan jawaban setuju yaitu sebanyak 26 orang/responden atau 66.67 % dan

sangat setuju yaitu sebanyak 13 orang/responden atau 33.33 %.

Untuk masing-masing *input*, *output* dan *outcome* untuk setiap

Tabel 4.2 Tanggapan responden APBD telah disusun dengan format yang mudah difahami.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat setuju	5	14	70	35.89
2	Setuju	4	25	100	64.11
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak setuju	1	0	0	0
Total			39	170	100
Rata-rata Skor = $\frac{170}{39} = 4.36$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan tabel diatas, bahwa APBD telah disusun dengan format yang mudah difahami dimana sebagian besar responden memberikan jawaban sangat mudah dipahami yaitu sebesar 25 orang/responden atau 64.11 % dan responden yang menjawab setuju

Tabel 4.3 Tanggapan responden mengenai Ukuran kinerja untuk setiap kegiatan telah disebutkan dengan jelas

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat setuju	5	22	110	56.41
2	Setuju	4	17	68	43.59
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak setuju	1	0	0	0
Total			39	178	100
Rata-rata Skor = $\frac{178}{39} = 4.56$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data tabel diatas, bahwa Ukuran kinerja untuk setiap kegiatan telah disebutkan dengan jelas, dimana jawaban yang diberikan oleh sebagian responden memberikan jawaban sangat setuju

kegiatan/program telah disebutkan dengan jelas di APBD.

yaitu sebanyak 14 orang/responden atau 35.89 %.

Penyusunan anggaran yang dibuat sesuai dengan format yang mudah dipahami akan memudahkan dalam menyusun dan menengkoreksi serta mengevaluasi.

yaitu 22 orang/responden atau 56.41 % dan sebagian responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 17 orang/ responden atau 43.59 %. Bahwa dengan setiap kegiatan telah disebutkan dengan jelas maka akan

menghindarkan dari penyimpangan anggaran.

disajikan dengan jelas di dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Tabel 4.4. Tanggapan responden mengenai Tujuan dan sasaran untuk setiap kegiatan telah

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat setuju	5	18	90	46.15
2	Setuju	4	21	84	53.85
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak setuju	1	0	0	0
Total			39	174	100
Rata-rata Skor = $\frac{174}{39} = 4.46$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Tujuan dan sasaran untuk setiap kegiatan telah disajikan dengan jelas di dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Sebagian responden menjawab setuju yaitu sebesar 21 orang/responden atau 53.85 % dan

responden yang menjawab sangat setuju yaitu sebesar 18 orang/responden atau 46.15 %. Dalam penyusunan RASK Tujuan dan sasaran untuk setiap kegiatan telah disajikan dengan jelas agar tepat sasaran dan tepat tujuan.

Tabel 4.5 Tanggapan responden mengenai RASK telah menyajikan informasi yang jelas hubungan besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat setuju	5	16	80	41.03
2	Setuju	4	23	92	58.97
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak setuju	1	0	0	0
Total			39	172	100
Rata-rata Skor = $\frac{172}{39} = 4.41$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa RASK telah

menyajikan informasi yang jelas hubungan besaran anggaran (beban

kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai. dimana sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yaitu sebesar 23 orang/responden atau 58.97 %, sedangkan yang menjawab sangat sangat yaitu sebanyak 16 orang/responden atau 41.03 %.

RASK memang harus menyajikan informasi yang jelas

yang berkaitan dengan beban kerja dan harga satuan, ini dimaksudkan agar tidak ada kecurigaan dan penyalahgunaan anggaran oleh SKPD.

Tabel 4.6 Tanggapan responden mengenai Pos pendapatan di dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	19	95	48.72
2	Setuju	4	20	80	51.28
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	175	100
Rata-rata Skor = $\frac{175}{39} = 4.49$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa Pos pendapatan di dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan dimana sebagian besar responden memberikan jawaban setuju yaitu sebesar 20 orang/responden atau 51.28 %, sedangkan responden yang

menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 19 orang/responden atau 28.72 %.

Dari analisis yang penulis lakukan bahwa pendapatan yang berada di APBD harus terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dan belanja yang sudah direncanakan.

Tabel 4.7 Tanggapan responden mengenai APBD telah disusun dengan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	23	115	58.97
2	Setuju	4	16	64	41.03
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0

Total	39	179	100
Rata-rata Skor = $\frac{179}{39} = 4.59$			

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa APBD sangat telah disusun dengan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju yaitu sebesar 23 orang/responden atau 58.97 %, sedangkan yang menjawab setuju yaitu sebanyak 16 orang/responden atau 41.03 %.

Dengan penyusunan anggaran yang didasari atas prinsip transparansi dan akuntabilitas akan menjadikan anggaran lebih maksimal diserap serta menghindari dari tindakan-tindakan korupsi dan memperkaya diri sendiri dan golongan karena rakyat ikut memantau.

Tabel 4.8 Tanggapan responden mengenai APBD telah memenuhi prinsip-prinsip anggaran kinerja

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	21	105	53.85
2	Setuju	4	18	72	46.15
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	177	100
Rata-rata Skor = $\frac{177}{39} = 4.54$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa APBD telah memenuhi prinsip-prinsip anggaran kinerja dimana sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju yaitu sebesar 21 orang/responden atau 53.85 %, sedangkan rresponden yang menjawab setuju yaitu sebanyak 18

orang/responden atau 46.15 %. Dengan APBD yang telah memenuhi prinsip-prinsip anggaran kerja maka memungkinkan setiap SKPD dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan rencana yang telah di tuangkan dalam program kerja berjalan.

Tabel 4.9 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai perencanaan anggaran

No.	Tanggapan Responden	Rata-rata Skor	Rata-rata (%)
1	Dalam APBD telah disebutkan dengan jelas masing-masing <i>input</i> , <i>output</i> dan <i>outcome</i> untuk setiap	4.33	86.66

	kegiatan/program		
2	APBD telah disusun dengan format yang mudah difahami.	4.36	87.18
3	Ukuran kinerja untuk setiap kegiatan telah disebutkan dengan jelas.	4.56	91.28
4	Tujuan dan sasaran untuk setiap kegiatan telah disajikan dengan jelas di dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).	4.46	89.23
5	RASK telah menyajikan informasi yang jelas hubungan besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai.	4.41	88.21
6	Pos pendapatan di dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.	4.49	89.74
7	APBD telah disusun dengan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.	4.59	91.79
8	APBD telah memenuhi prinsip-prinsip anggaran kinerja.	4.54	90.77
	Rata-rata skor dan rata-rata persentase	4.47	89.36

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data tabel diatas yang merupakan rekapitulasi dari kedelapan poin dari perencanaan anggaran maka dapat dikatakan *sangat baik*, hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase rekapitulasi sebesar 89.36 %. Perencanaan dengan APBD yang jelas masing-masing *input*, *output* dan *outcome*, disusun dengan format yang mudah difahami, ukuran kinerja untuk setiap kegiatan telah disebutkan dengan jelas termasuk tujuan dan sasaran untuk setiap kegiatan juga telah disajikan dengan jelas, dan APBD telah disusun dengan memenuhi

prinsip transparansi dan akuntabilitas serta Pos pendapatan di dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan dengan telah memenuhi prinsip-prinsip anggaran kinerja.

B. Pengawasan Anggaran

Proses pengawasan anggaran pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi keuangan yang benar dan telah ditetapkan. pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk

menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Hal ini penting mengingat anggaran ini adalah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (rakyat).

Pengawasan anggaran dalam upaya untuk mengetahui seberapa jauh pengawasan yang dilakukan didalam pengelolaan anggaran sehingga efisiensi keuangan dapat

dicapai, untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.10 Tanggapan responden mengenai Mengetahui dan memahami Visi & Misi, Renstrada, Propeda dan Repetada

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	14	70	35.90
2	Setuju	4	25	100	64.10
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	170	100
Rata-rata Skor = $\frac{170}{39} = 4.36$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data diatas, bahwa Mengetahui dan memahami Visi & Misi, Renstrada, Propeda dan Repetada, hal ini dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh responden yang menjawab sangat setuju yaitu sebesar 25 orang/ responden atau 64.10 %, sedangkan responden yang menjawab setuju yaitu sebesar 14 orang/ responden atau 35.90 %. Untuk responden yang

menjawab kurangsetuju dan tidak setuju serta sangat tidak setuju tidak ada yang memilih. Dengan mengetahui dan memahami Visi & Misi, Renstrada, Propeda dan Repetada, maka penyusunan anggaran pun akan lebih terarah dan memenuhi unsur-unsur kinerja serta kebutuhan, sehingga tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan undang-undang.

Tabel 4.11 Tanggapan responden mengenai mengetahui bagaimana proses penyusunan APBD.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
-----	---------------------	----------	---	-----	---

1	Sangat Setuju	5	10	50	25.64
2	Setuju	4	29	116	74.36
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	166	100
Rata-rata Skor = $\frac{166}{39} = 4.26$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data tabel diatas, bahwa mengetahui bagaimana proses penyusunan APBD dimana sebagian besar responden memberikan jawaban mengetahui yaitu sebanyak 29 orang/responden atau 74.36 % dan yang memberikan jawaban sangat Mengetahui yaitu

sebanyak 10 orang/ responden atau 25.64 %. Dengan memahami dan mengetahui bagaimana cara menyusun anggaran, maka tidak menjadi kesulitan didalam menyusun dan merencanakan anggaran sehingga lebih efektif dan lebih tepat guna.

Tabel 4.12 Tanggapan responden mengenai Mengetahui dan memahami apa dan bagaimana anggaran kinerja.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	16	80	41.03
2	Setuju	4	23	92	58.97
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	172	100
Rata-rata Skor = $\frac{172}{39} = 4.41$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa Mengetahui dan memahami apa dan bagaimana anggaran kinerja, dimana sebagian besar responden memberikan jawaban mengetahui dan memahami yaitu 23 orang/responden atau 58.97%. dan yang memberikan jawaban sangat

mengetahui dan sangat memahami yaitu sebanyak 16 orang/responden atau 41.03 %.

Didalam melakukan penyusunan anggaran kita harus mengetahui dan memahami apa dan bagaimana anggaran kinerja itu, dengan mengetahui maka anggaran yang di buat akan efektif dan sesuai

dengan program yang telah akan terjadi perbaikan. ditetapkan dan kemungkinan kecil

Tabel 4.13 Tanggapan responden mengenai Ukuran kinerja untuk setiap kegiatan dalam APBD telah saya ketahui.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	15	75	38.46
2	Setuju	4	24	96	61.54
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	171	100
Rata-rata Skor = $\frac{171}{39} = 4.38$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa Ukuran kinerja untuk setiap kegiatan dalam APBD telah saya ketahui, hal ini dilihat dari sebagian besar jawaban yang diberikan oleh responden adalah telah mengetahui yakni sebesar 24 orang/responden atau 61.54 %, dan responden yang menjawab sangat mengetahui yaitu sebanyak 15 orang/responden atau 38.46 %. dan responden yang memberikan

jawaban kurang mengetahui, dan tidak mengetahui serta sangat tidak mengetahui tidak ada yang menjawab.

Dengan mengetahui ukuran kinerja untuk setiap kegiatan dalam APBD diharapkan dapat menyusun anggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta bila terjadi kesalahan dapat segera di refisi dan mudah didalam melakukan pertanggung jawabannya.

Tabel 4.14 Tanggapan responden mengenai Memahami Arah Kebijakan Umum (AKU) untuk setiap Dinas/Instansi.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	20	100	51.28
2	Setuju	4	19	76	48.72
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	176	100
Rata-rata Skor = $\frac{176}{39} = 4.51$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa Memahami Arah

Kebijakan Umum (AKU) untuk setiap Dinas/Instansi, hal ini

ditunjukkan oleh sebagian besar responden memberikan jawaban sangat memahami AKU yaitu sebesar 20 orang/responden atau 51.28 %, sedangkan untuk responden yang memberikan jawaban memahami AKU yaitu sebesar 19 orang/responden atau 48.72%, dan untuk responden yang menjawab kurang mengetahui, tidak

mengetahui dan sangat tidak mengetahui tidak ada yang menjawab.

Dengan telah mengetahui arah kebijakan umum maka arah anggaran dapat di kendalikan dan di kontrol, sehingga meminimalisir penyimpangan dan anggaran dapat terserap 100%.

Tabel 4.15 Tanggapan responden mengenai Mampu mengidentifikasi jika terdapat penggelembungan/ *mark-up* dalam APBD.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Mampu	5	11	55	28.21
2	Mampu	4	28	112	71.79
3	Kurang Mampu	3	0	0	0
4	Tidak Mampu	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Mampu	1	0	0	0
Total			39	167	100
Rata-rata Skor = $\frac{167}{39} = 4.28$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa Mampu mengidentifikasi jika terdapat penggelembungan/*mark-up* dalam APBD, hal ini dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden mengatakan mampu yaitu sebanyak 28 orang/responden atau 71.79 %, dan responden yang menjawab sangat mampu yaitu sebanyak 11 orang/responden atau 28.21 %.

Dengan mampu mengidentifikasi jika terdapat penggelembungan/*mark-up* dalam APBD, maka anggaran yang direncanakan untu membiayai pengadaan barang/jasa/kontruksi dan lain-lain akan mempunyai kualitas yang sangat baik dan mempunyai umur pemakaian yang akan relatif panjang serta dapat dikatakan bahwa anggaran yang disusun sangat sehat dari korupsi.

Tabel 4.16 Tanggapan responden mengenai memahami *input, output dan outcome* untuk setiap kegiatan dalam APBD.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	17	85	43.59
2	Setuju	4	22	88	56.41
3	Kurang Setuju	3	0	0	0

4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	173	100
Rata-rata Skor = $\frac{173}{39} = 4.44$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa Memahami *input, output dan outcome* untuk setiap kegiatan dalam APBD, hal ini dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 22 orang/responden atau 56.41 %, dan respondnen yang menjawab sangat

setuju yaitu sebanyak 17 orang/responden atau 43.59 %.

Dengan telah memahami *input, output dan outcome* untuk setiap kegiatan dalam APBD maka diharapkan anggaran yang disusun dapat balance/imbang antara input dan output yang direncanakan.

Tabel 4.17 Tanggapan responden mengenai memahami Laporan perhitungan APBD dan Nota Perhitungan APBD.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	8	40	20.51
2	Setuju	4	31	124	79.49
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	164	100
Rata-rata Skor = $\frac{164}{39} = 4.21$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa Memahami Laporan perhitungan APBD dan Nota Perhitungan APBD, hal ini dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden memahami

yaitu sebanyak 31 orang/responden atau 79.49 %, dan respondnen yang menjawab sangat memahami yaitu sebanyak 8 orang/responden atau 20.51 %.

Tabel 4.18 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai pengawasan anggaran

No.	Tanggapan Responden	Rata-rata Skor	Rata-rata (%)
1	Mengetahui dan memahami Visi & Misi, Renstrada, Propeda dan Repetada	4.36	87.18

2	Mengetahui bagaimana proses penyusunan APBD.	4.26	85.13
3	Mengetahui dan memahami apa dan bagaimana anggaran kinerja.	4.41	88.21
4	Ukuran kinerja untuk setiap kegiatan dalam APBD telah saya ketahui.	4.38	87.69
5	Memahami Arah Kebijakan Umum (AKU) untuk setiap Dinas/Instansi.	4.51	90.26
6	Mampu mengidentifikasi jika terdapat penggelembungan/ <i>mark-up</i> dalam APBD.	4.28	85.64
7	Memahami <i>input, output dan outcome</i> untuk setiap kegiatan dalam APBD.	4.44	88.72
8	Memahami Laporan perhitungan APBD dan Nota Perhitungan APBD.	4.21	84.10
Rata-rata skor dan rata-rata persentase		4.36	87.12

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data diatas yang merupakan rekapitulasi dari kedelapn poin dari pengawasan anggaran maka dapat dikatakan *sangat baik*, hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase rekapitulasi sebesar 87.12%. Pengawasan, segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan pada penyusunan anggaran di dinas pekerjaan umu provinsi Kalimantan timur.

Pengawasan dilakukan agar segala bentuk penyimpangan dan penyalah gunaan anggaran dan wewenang dapat diminimalisir, sehingga anggaran yang tidak tepat

asaran dan tidak terserap dengan baik dapat ditekan seminimal mungkin.

C. Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Efektivitas dalam tujuannya untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19 Tanggapan responden mengenai agar APBD disusun sesuai dengan format anggaran berbasis kinerja

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	16	80	41.03
2	Setuju	4	23	92	59.97

3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	172	100
Rata-rata Skor = $\frac{172}{39} = 4.41$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa agar APBD disusun sesuai dengan format anggaran berbasis kinerja, hal ini dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden mengatakan sangat setuju yaitu sebesar 16 orang/respondena atau 41.03% dan responden yang memberikan jawaban setuju yaitu sebanyak 23

Tabel 4.20 Tanggapan responden mengenai dalam pembahasan RAPBD saya meminta agar tujuan dan ukuran kinerja disebutkan dengan jelas untuk setiap program

orang/responden atau 59.97%. Sedangkan yang menjawab kurang setuju, tidak setuju serta sangat tidak setuju tidak ada yang memilih.

Degan anggaran yang disusun sesuai dengan format anggaran berbasis kinerja memungkinkan anggaran dapat terserap secara maksimal untuk kepentingan kebutuhan yang sudah terencana.

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	9	45	23.08
2	Setuju	4	30	120	76.92
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	165	100
Rata-rata Skor = $\frac{165}{39} = 4.23$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa dalam pembahasan RAPBD saya meminta agar tujuan dan ukuran kinerja disebutkan dengan jelas untuk setiap program, hal ini dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden mengatakan setuju yaitu sebanyak 30 orang/responden atau 76.92 % dan responden yang menjawab

sangat setuju yaitu sebesar 9 orang/ responden atau 23.08 %.

Dengan disebutkannya tujuan dan ukuran kinerja degan jelas maka dapat meminimalisir adanya pembiayaan yang tidak terdapat di program rencana anggaran serta dapat memaksimalkan pembiayaan.

Tabel 4.21 Tanggapan responden mengenai Pos belanja yang tercantum dalam APBD sesuai dengan standar belanja/indeks harga yang berlaku serta menunjukkan angka/jumlah yang rasional (tidak *overestimate*).

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	24	120	61.54
2	Setuju	4	15	60	38.46
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	180	100
Rata-rata Skor = $\frac{180}{39} = 4.62$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa Pos belanja yang tercantum dalam APBD sesuai dengan standar belanja/indeks harga yang berlaku serta menunjukkan angka/jumlah yang rasional (tidak *overestimate*) hal ini

dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden mengatakan sangat setuju yaitu sebesar 24 orang/responden atau 61.54 % dan responden yang menjawab setuju yaitu sebesar 15 orang/responden atau 38.46 %.

Tabel 4.22 Tanggapan responden mengenai Melakukan koreksi terhadap perhitungan RAPBD yang salah

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	20	100	51.28
2	Setuju	4	19	76	48.72
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	176	100
Rata-rata Skor = $\frac{176}{39} = 4.51$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa Melakukan koreksi terhadap perhitungan RAPBD yang salah, hal ini dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden

menjawab sangat setuju yaitu 20 orang/responden atau 51.28 %, sedangkan jawaban responden yang mengatakan setuju yaitu sebanyak 19 orang/responden atau 48.72 %.

Tabel 4.23 Tanggapan responden mengenai Anggaran pendapatan dan belanja yang tercantum dalam APBD telah sesuai dengan

prioritas program masing-masing dinas/instansi sebagaimana yang tercantum di dalam Arah Kebijakan Umum (AKU).

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	24	120	61.54
2	Setuju	4	15	60	48.46
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	180	100
Rata-rata Skor = $\frac{180}{39} = 4.62$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa Anggaran pendapatan dan belanja yang tercantum dalam APBD telah sesuai dengan prioritas program masing-masing dinas/instansi sebagaimana yang tercantum di dalam Arah Kebijakan Umum (AKU), hal ini dapat

ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden mengatakan sangat setuju yaitu sebesar 24 orang/responden atau 61.54 % dan responden yang menjawab setuju yaitu sebesar 15 orang/responden atau 38.46 %.

Tabel 4.24 Tanggapan responden mengenai Setiap anggaran pendapatan dan belanja telah diklasifikasikan sesuai dengan kelompok klasifikasinya masing-masing

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	18	90	46.15
2	Setuju	4	21	84	53.85
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	174	100
Rata-rata Skor = $\frac{174}{39} = 4.46$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa Setiap anggaran pendapatan dan belanja telah diklasifikasikan sesuai dengan kelompok klasifikasinya masing-masing, hal ini dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban

responden mengatakan setuju yaitu sebesar 21 orang/responden atau 53.85 %, untuk responden yang menjawab sangat setuju yaitu sebesar 18 orang/responden atau 46.15 %.

Tabel 4.25 Tanggapan responden mengenai Memberikan usulan/masukan bagaimana agar tujuan dan sasaran anggaran dapat tercapai

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	14	70	35.90
2	Setuju	4	25	100	64.10
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	170	100
Rata-rata Skor = $\frac{170}{39} = 4.36$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa memberikan usulan/masukan bagaimana agar tujuan dan sasaran anggaran dapat tercapai, hal ini dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden mengatakan setuju yaitu sebesar 25 orang/responden atau 64.10%, untuk responden yang menjawab sangat setuju yaitu sebesar 14 orang/responden atau 35.90 %.

Tabel 4.26 Tanggapan responden mengenai Apa yang di usulkan/koreksi diikuti oleh pihak eksekutif

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	24	120	61.54
2	Setuju	4	15	60	48.46
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	180	100
Rata-rata Skor = $\frac{180}{39} = 4.62$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa Apa yang di usulkan/koreksi diikuti oleh pihak eksekutif, hal ini dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden mengatakan sangat Jelas yaitu sebesar 24 orang/responden atau 61.54 % dan responden yang menjawab setuju yaitu sebesar 15 orang/responden atau 38.46 %.

Tabel 4.27 Tanggapan responden mengenai saya akan mencermati apa alasan atau penyebab jika pihak eksekutif mengusulkan perubahan APBD

No.	Tanggapan Responden	Skor (X)	F	F.X	%
1	Sangat Setuju	5	13	65	33.33
2	Setuju	4	26	104	66.67
3	Kurang Setuju	3	0	0	0
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Total			39	169	100
Rata-rata Skor = $\frac{169}{39} = 4.33$					

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa saya akan mencermati apa alasan atau penyebab jika pihak eksekutif mengusulkan perubahan APBD, hal ini dapat ditunjukkan oleh sebagian besar jawaban responden mengatakan setuju yaitu sebesar 26 orang/responden atau 66.67 %, untuk responden yang menjawab sangat setuju yaitu sebesar 13 orang/responden atau 33.33%.

Tabel 4.28 Rekapitulasi tanggapan responden mengenai efektivitas keuangan

No.	Tanggapan Responden	Rata-rata Skor	Rata-rata (%)
1	Meminta agar APBD disusun sesuai dengan format anggaran berbasis kinerja.	4.41	88.21
2	Dalam pembahasan RAPBD saya meminta agar tujuan dan ukuran kinerja disebutkan dengan jelas untuk setiap program.	4.23	84.62
3	Pos belanja yang tercantum dalam APBD sesuai dengan standar belanja/indeks harga yang berlaku serta menunjukkan angka/jumlah yang rasional (tidak <i>overestimate</i>).	4.62	92.31
4	Melakukan koreksi terhadap perhitungan RAPBD yang salah.	4.51	90.26
5	Anggaran pendapatan dan belanja yang tercantum dalam APBD telah sesuai dengan prioritas program masing-masing dinas/instansi sebagaimana yang tercantum di dalam Arah Kebijakan Umum (AKU).	4.62	92.31

6	Setiap anggaran pendapatan dan belanja telah diklasifikasikan sesuai dengan kelompok klasifikasinya masing-masing.	4.46	89.23
7	Memberikan usulan/masukan bagaimana agar tujuan dan sasaran anggaran dapat tercapai.	4.36	87.18
8	Apa yang saya usulkan/koreksi diikuti oleh pihak eksekutif.	4.62	92.31
9	Saya akan mencermati apa alasan atau penyebab jika pihak eksekutif mengusulkan perubahan APBD	4.33	86.67
Rata-rata skor dan rata-rata persentase		4.46	89.23

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data diatas yang merupakan rekapitulasi dari kesembilan poin dari efektivitas keuangan, maka dapat dikatakan *sangat baik*, hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase rekapitulasi yaitu sebesar 89.23 %. Efektivitas ; tercapainya sasaran tepat pada

waktunya untuk disediakan sumber dan sarana kerja tertentu yang dianggap memadai. Dengan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 4.29 Rekapitulasi ketiga dimensi (perencanaan anggaran, pengawasan anggaran dan efektivitas keuangan)

No.	Indikator Kualitas Pelayanan	Rata-rata (%)	Kategori
1	Perencanaan Anggaran	89.36	Sangat Baik
2	Pengawasan Anggaran	87.12	Sangat Baik
3	Efektivitas Keuangan	89.23	Sangat Baik

Sumber : Data yang diolah dari data primer penelitian 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa efektivitas keuangan sudah berjalan dengan sangat baik, yang tidak terlepas dari perencanaan yang sangat baik serta pengawasan yang sangat baik pula hal ini dapat dilihat dengan rata-rata persentase penilaian responden pada ketiga variabel sudah berada diatas 60%, yang artinya bahwa dengan perencanaan dan pengawasan anggaran yang sangat baik maka

dapat menghasilkan efektivitas keuangan yang baik pula.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Efektivitas Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur sudah sangat baik.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa, secara umum Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengawasan Anggaran Terhadap

Efektivitas Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat baik, hal ini dapat dibuktikan dari hasil rekapitulasi dari masing-masing variabel yaitu variabel perencanaan anggaran hasil rata-rata rekapitulasi menunjukkan prosentase sebesar 89.36 %. Sedangkan untuk pengawasan anggaran dari hasil rata-rata rekapitulasi menunjukkan prosentase sebesar 87.12 %. Dan untuk efektivitas keuangan dari hasil rata-rata rekapitulasi menunjukkan prosentase sebesar 89.23 %.

Sedangkan dari hasil rekapitulasi dari ketiga variabel yaitu perencanaan anggaran, pengawasan anggaran dan efektivitas keuangan menunjukkan hasil rata-rata sebesar 88.57 %, yang artinya bahwa hasil dari rekapitulasi lebih besar dari 60%, sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengawasan anggaran terhadap efektivitas keuangan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum provinsi Kalimantan timur sudah sangat baik/efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa Aparat pemerintah hendaknya terus meningkatkan pengendalian terhadap anggaran, sehingga kebocoran dapat dihindarkan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara unit, sehingga tiap hambatan dapat diantisipasi pemecahannya. Jadi pegawai bekerja tidak hanya sekedar memenuhi syarat minimum. Aparat pemerintah hendaknya terus meningkatkan kinerja pemerintah pada

pengendalian dan penyerapan anggaran.

Ketika anggaran sedang dilaksanakan haruslah dilakukan evaluasi oleh pimpinan masing-masing unit kerja supaya dapat mengetahui sejauh mana tingkat penggunaan dana yang telah dilaksanakan, serta hendaknya ada peningkatan sumber daya manusia dari segi akademik yang khususnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

BIBLIOGRAFI

Anthony, R.N. dan V. Govindarajan. 2004. *Management Control Systems*, Eleventh Edition, McGraw-Hill Companies, Inc, U.S.A,

_____, dan Reece, J S. 1989. *Accounting Text and Cases*, 8th Edition, Homewood: Richard D Irwin Inc.

_____, dan Young D.W. 2003. *Management Control in Nonprofit Organizations*, Seventh Edition, McGraw-Hill Companies, Inc, U.S.A

Bahrullah Akbar (2002) *Fungsi Manajemen Keuangan*, Boklet Publikasi BPK, No.87 Bulan Oktober, Jakarta, BPK

Baswir, Revrisond .(1988) . *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* . Edisi ketiga, BPF. Yogyakarta

Chow C.W, Jean C.C, dan Wlliams S.W. 1988. *“Participative Budgeting: Effects of a Truth-Inducing Pay Scheme and Information Asymmetry on Slack and Performance”*. *The*

- Accounting Review*. Vol. LXIII, No.1, January. pp.111-122,
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi pertama, Salemba empat, Jakarta
- Gibson, Ivancecich, Donnelly, 1995, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Erlangga, Jakarta
- Hani T Handoko, Dkk. 2006, *Organisasi Perusahaan*, BPFE, Yogyakarta.
- Hansen, Don R. dan M.M. Mowen. 2003. *Management Accounting*. 6th Edition, South-Western College Publishing
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta,
- John Suprihanto, 1998, *Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan*. BPFE. Yogyakarta
- Kenis, Izzetin. 1979. "Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance". *The Accounting Review*. Vol. LIV, No.4, October. pp. 707-721,
- Koentjoroningrat, 1997, *Kebudayaan, Mentalis dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta
- Lowe, E. 1970. "A Budgetary Control: An Evaluation in Wider Managerial Perspective". *Accountancy*, November. pp. 765,
- Malayu SP Hasibuan, 2002. *Manajemen Sumber daya manusia*, Gunung Agung. Jakarta
- Mardiasmo, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____, 2002, *Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta
- Milles, Matthew B dan A. Michel Huberman, 2004, *Analisis Data Kualitatif*, UI - Press, Jakarta
- Moleong, Lexy, J, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nimran, Umar, 1999, *Perilaku Organisasi*, Citra Media, Surabaya.
- Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2000, Balai Pustaka, Jakarta
- Randupandojo dan Suad Husnan, 1999, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Robbin P. Stephen, 2003, *Perilaku Organisasi*, Alih Bahasa, Tim Indeks, Gramedia, Jakarta.

- Schiff, M., dan A.Y Lewin. 1970. "The Impact of People on Budgets". *The Accounting Review*. April. pp. 259-268,
- Singarimbun, Mardalis dan Efendy Sofyan, 1996, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta
- Sondang P Siagian. 2000, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Cetakan ke 3, Gunung Agung, Jakarta
- Stoner, James A.F. 1982. *Management 2nd Edition*. Prentice-Hall,
- Swieringa, R.J dan R.H Moncur. 1975. "Some effects of Participative Budgeting on Managerial Behavior". *National Association of Accountants*.
- The Bigg Picture. 2001. Apa Anggaran Kinerja Itu?, <http://www.bigg.or.id>,
- Tyson, Saun & Tony Jackson, 2000, *The Esesnce Of Organizational Behavior, Perilaku Organisasi*, Andi, Jogjakarta
- Jusup, Al Haryono, 2004, *Dasar-dasar Akuntansi*, Jilid I, Edisi Keenam, Cetakan Kedua, STIE-TKPN, Yogyakarta
- Zaki Baridwan, 2000. . Edisi Tujuh, BPFE, Yogyakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Public Institute Dialog, Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Public Institute Dialog, Jakarta
- Departemen Dalam Negeri Indonesia, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Bank Dunia (2005) *Indonesia Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah Suatu Kerangka Kerja Pengukuran* makalah pada Workshop A Measurement Framework Public Financial Management, 28-29 Agustus, Bali